TUGAS RESUME HUKUM TATA NEGARA

NAMA: SUMARNI

NIM : 10200120237

KELAS: HTN F

PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM

- Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum
Pemilu di Indonesia merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang sah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang di manifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (pemilu). pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. suatu kategori kelompok pemilih yang sangat menarik untuk di amati dan di teliti lebih jauh adalah pemilih pemula. pemilih pemula adalah pemilih-pemilih yang baru pertama kali akan memberikan suaranya dalam pemilu. tujuan penulisan ini adalah bentuk untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu, faktor-faktor pendukung partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu. metode penulisan yang di gunakan dalam paper jurnal ini adalah studi kepustakaan dengan di dukung oleh hasil penelitian yang relevan. di harapkan pemilih pemula lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan politik dengan cara membagi waktu antara belajar dan mengikuti kegiatan politik.

(primandha sukma nur wardhani : 10 (1), 57-62, 2018)

- Di namika komunikasi politik dalam pemilihan umum
Kebebasan dalam berkomunikasi yang mewarnai kehidupan politik, berdampak terhadap tuntutan demokratisasi bernegara yang faktual melalui pemilihan umum yang berkeadilan dan menghasilkan anggota legislatif yang berpihak kepada rakyat. penelitian tentang dinamika komunikasi politik dan pemilihan umum bertujuan untuk memberi gambaran tentang dinamika komunikasi politik dalam rangka menghadapi pemilihan umum. temuan penelitian mencakup, keberadaan para komunikator politik yang terdiri dari elite parpol dan calon anggota legislatif, partisipasi masyarakat dalam

menggunakan hak suara, dan kualitas anggota legislatif hasil pemilihan umum. ketiga temuan tersebut merupakan faktor mendasar pendukung keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum yang menghasilkan anggota legislatif berkualitas. penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang diitikberatkan pada penelusuran data yang berkaitan dengan pemilu legislatif. (Eko harry susanto : 1 (2), 163-172, 2013)

- Partai politik dan sistem pemilihan umum di indonesia
Sebuah negara yang telah memilih untuk menjadi negara demokratis tentu tak lepas dari masalah yang berkaitan dengan partai politik dan sistem pemilihan umumnya. partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi, sedangkan sistem pemilu merupakan mekanisme dalam melembagakan kekuasaan secara konstitusional. indonesia yang dulu di kenal sebagai negara yang bercirikan negara otoritarian secara radikal beralih menjadi negara demokratis hingga hampir melampaui amerika serikat sebagai peletak dasar negara demokrasi. di tengah keberanian itu, sebagian pengamat menganggap bahwa indonesia telah “kebablasan” dalam berdemokrasi karena negaraa kica di anggap belum matang dalam menjalankan “beban berat” demokrasi. sekalipun demikian, sebagian tetap optimis bahwa indonesia sedang mengalami masa transisi menuju kedewasaan berdemokrasi. terlepas dari itu kita patut bersyukur kita mampu lepas dari cengkaman orde baru yang berkarakter otoriter setelah lebih dari tiga dasawarsa negara dalam bayang-bayang rezim tersebut.

(Muhadam labolo, teguh ilham : rajawali pers, 2015)

- Hambatan transparansi keuangan partai politik dan kampanye pemilihan umum
Kinerja organisasi publik seperti partai politik memiliki aspek yang erat dengan transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk melakukan yang efektif, efisien dan adil. namun dalam peraturan undang-undangan indonesia masih terdapat pasal-pasal yang menghambat transparansi keuangan partai politik dan kampanye pemilihan umum. faktor penghambat itu, antara lain : pengumuman sumbangan pribadi kepada partai politik cenderung menunjukkan pajak kepada pasal yang di berlakukan, tidak terdapat larangan sumbangan dalam bentuk tunai sehingga sulit untuk memeriksa identitas, alamat, dan bahkan pekerjaan atau tenaga kerja penyumbang, dan tidak terdapat ketentuan tentang pembantuan tentang pencucian uang dengan spesifik dan spesifik dalam pengelolaan-pengelolaan keuangan partai dan kampanye pemilu. untuk mengatasi hambatan ini maka perlu di lakukan :
Revisi undang-undang nomor 2 tahun 2011 dengan klausul pasal yang

menjamin setiap orang yang memberikan sumbangan kepada partai politik yang sesuai dengan konstitusi, Pancasila dan undang-undang tidak akan mengatur nasionalitas, merevisi seluruh peraturan perundang-undangan mengenai pemilu dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur pembinaan kepada partai politik dalam bentuk tunai dan menyelaraskan seluruh peraturan perundang-undangan tentang pemilu dengan peraturan perundang-undangan yang terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

(Markus H Simarmata : 21-36, 2018)

- Media komunikasi politik

Buku ini didedikasikan sebagai telaah akademis terhadap fenomena media, baik di media arus utama (mainstream) maupun di media sosial dalam hubungannya dengan ragam aktivitas politik aktor perseorangan maupun lembaga. Kajian tentang hubungan media dan politik membentang panjang dalam sejarah ilmu komunikasi politik. Mulai dari opini publik, propaganda, kampanye, publisitas politik, political public relations, dan lain-lain. Terdapat relasi kuasa politik yang sangat menarik di telaah baik secara akademis maupun praktis di panggung politik media, baik yang terjadi di masa lalu, saat ini maupun di masa yang mendatang. Media tidak semata menjadi saluran komunikasi politik. Di banyak peristiwa media kerap kali tampil menjadi aktor politik yang memainkan peran signifikannya. Dalam konteks inilah, kajian tentang media komunikasi politik sangat penting. Dr. Gun Gun Heryanto M. Si. penulis "Buku ini memberikan panduan ilmiah dan pedoman praktis bagi para calon pemimpin politik ketika mengaktualisasikan gagasan dan cita-citanya menghadapi masyarakat informasi yang sedang mengalami revolusi media sosial. Buku ini juga penting di baca masyarakat luas agar dapat memahami bagaimana para pemimpin politik mengoperasikan simbol-simbol untuk memperkuat posisi politik mereka di publik. Buku ini juga menyajikan analisis komprehensif tentang komunikasi politik dan detail isu-isu penting terkait. Prof. Dr. H. Faisal Ismail, MA, Ph. D., duta besar RI untuk negara Kuwait dan Bahrain 2002-2006 dan guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta "Merawat demokrasi itu soal komitmen, pelaku utama dalam proses komunikasi politik (politisi, masyarakat dan media) harus punya iktikad baik. Gun Gun Heryanto dengan gaya khasnya selalu membumikan bahasa berat politik dan menempatkannya ke ruang-ruang awam. Buku ini menjadi pengingat bagi politisi, masyarakat dan media bahwa pertarungan sekeras apa pun tidak boleh menyisakan luka sosial. Peran sentral media dalam proses komunikasi politik diingatkan penulis agar sekuat mungkin terhindar dari bias kepentingan.

Yogi Arif Nugraha wakil pemimpin redaksi Kompas TV "Politisi dan mereka

yang ingin memanfaatkan media sebagai wahana konstruksi citra dan juga memahami cara mentransformasikan media sebagai saluran komunikasi politik.

(Gun gun heryanto ; IRCiSoD, 2018)

- Dampak pemilihan umum serentak bagi pembangunan demokrasi indonesia Pemilu merupakan mekanisme demokrasi untuk memilih orang yang akan mewakili rakyat dan memimpin pemerintahan. sejak 1955 ; indonesia telah menyelenggarakan 11 pemilihan umum. menurut pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan asas kedaulatan rakyat ; artinya orang yang memegang kekuasaan tertinggi harus di beri kesempatan untuk menentukan kekuasaan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pemilu terhadap pembangunan demokrasi di indonesia. berbicara tentang pemerintahan yang demokratis selalu berkaitan dengan derajat legitimasi, artinya pemerintahan harus mendapat legitimasi dari rakyat melalui pemilihan umum. jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan sudut pandang normatif. pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah patung dan pendekatan konseptual. data utama penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. pada tahun 2014 indonesia menjadi tuan rumah pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan presiden yang di adakan di hari yang berbeda. sebulan sebelum pemilihan umum di lakukan, mahkamah konstitusi mengumumkan putusan uji materi undang-undang nomor 42 tahun 2008. mahkamah konstitusi memutuskan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden di adakan secara serentak. putusan mahkamah konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 memiliki implikasi hukum terhadap pemilihan umum tahun 2014 dan juga pemilihan umum tahun 2019. sejak awal undang-undang baru ini di sahkan, komisi pemilihan umum telah melakukan segala persiapan untuk menyelenggarakan pemilihan umum serentak di indonesia. tujuan utamanya untuk mengurangi biaya. demokrasi indonesia telah lama di anggap terlalu mahal. kualitas demokrasi tergantung pada keadilan pemilihan umum bukan biaya. semua orang mendapatkan haknya dengan baik dan aman. itu penting untuk memastikan keadilan sekaligus menghindari kemungkinan konflik.

(Nanik prasetyoningsih ; 21 (2), 23, 2014)

- Perkembangan partai politik dan pemilihan umum di indonesia
 - Pemilihan umum
Jika di lihat dari masanya, pelaksanaan pemilu di indonesia di bedakan menjadi tiga masa yaitu pemilu masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin/orde lama, pemilu pada masa orde baru dan pemilu pada

masa reformasi. pelaksanaan pemilu pada tiap-tiap masa tersebut mempunyai ciri yang berbeda karena di pengaruhi oleh gaya kepemimpinan presiden yang berbeda pula. pada masa pemerintahan soekarno terdapat dua masa yang berbeda, masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin/orde lama. pada masa demokrasi liberal di laksanakan pemilu pertama kali tahun 1955, pemilu ini di kenal sangat demokratis meskipun diikuti banyak partai akan tetapi pelaksanaan tergolong lancar tanpa adanya pelanggaran apapun. sistem pemilu yang di pakai tahun 1955 yaitu sistem perwakilan berimbang. kesuksesan pelaksanaan pemilu pertama ini tidak bisa di lanjutkan. pemilu kedua yang seharusnya di laksanakan tahun 1960 ternyata tidak bisa di laksanakan karena presiden soekarno mengeluarkan dekrit yang menyatakan konstituante di bubarkan karena di anggap tidak merumuskan konstitusi negara. semenjak tidak di laksanakan pemilu periode kedua di sebut masa demokrasi terpimpin/orde lama. setelah demokrasi orde lama berakhir, di mulailah masa orde baru dibawah kepemimpinan presiden soeharto. berdasarkan TAP MPR tersebut pemilu di laksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 5 huli 1968. akan tetapi karena ketidaksiapan kondisi politik dan ekonomi pada saat itu, maka untuk kedua kalinya pelaksanaan pemilu kedua ini pun di tunda sebagian pengamat menganggap penundaan ini sengaja di lakukan oleh presiden soeharto agar kekuasaannya bertahan lama.

- Partai politik

Pada masa pemerintahan soekarno merupakan presiden pertama diindonesia di kenal ada dua bentuk penerapan demokrasi yaitu di sebut masa penerapan demokrasi liberal (1950-1959) dan penerapan demokrasi terpimpin (1959-1965) selama penerapan kedua masa tersebut partai politik mengalami suatu kondisi pasang surut yang bersifat di namis. pada masa demokrasi liberal saat itu indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer, pengaruh partai politik terhadap jalannya pemerintahan sangat luar biasa. hal ini terbukti dengan tidak berlangsung lamanya umur dari kabinet indonesia kala itu akibat sering di jatuhkan dengan jalan mosi tidak percaya dari DPR.

Masa demokrasi terpimpin/orde lama menurut miriam budiardjo di tandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, serta meluasnya peranan ABRI sebagai unsur politik.

Masa orde baru (1966-1998) partai politik juga mengalami kemunduran akibat pembatasan yang dilakukan oleh presiden soeharto. walaupun pada awal berkuasanya rezim orde baru sistem kepartaian

kita sempat menggunakan sistem multipartai namun pada tahun 1973 jumlah partai secara drastis di kurangi menjadi tiga partai politik melalui fusi atau penggabungan partai politik.

Pada era reformasi, partai politik seolah terlepas dari semua belenggu yang mengekang selama ini. rezim orde baru yang otoriter kemudian berganti kepada rezim reformasi yang demokratis. presiden pertama pada era reformasi yaitu presiden B.J Habibie akhirnya menerapkan kembali sistem multipartai. selain itu partai politik juga di perkenankan untuk tidak harus menjadikan pancasila sebagai ideologi partai. namun kondisi partai politik pada masa ini meninggalkan banyak catatan salah satunya ideologi partai.

(Muhadam labolo, teguh ilham ; rajawali pers, 2015)

- Fungsi partai politik
 - Miriam budihardjo
 - o sarana komunikasi politik
 - o sarana sosialisasi politik
 - o rekrutmen politik
 - o pengatur konflik
 - Almond dan powell
 - o rekrutmen politik
 - o sosialisasi politik
 - o artikulasi dan agregasi kepentingan
 - Friedrich
 - o selecting future leader
 - o maintaning contact between the government, including the oposition
 - o representing the various groupings in the comunity and
 - o integrating as many of the groups as possible

(Muhadam labolo, teguh ilham ; rajawali pers, 2015)

- Fungsi dan tujuan pemilihan umum
 - Fungsi pemilihan umum
 - o menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung
 - o sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah
 - o barometer dukungan rakyat terhadap penguasa
 - o sarana rekrutmen politik
 - o alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat

(Muhadam labolo, teguh ilham ; rajawali pers, 2015)

- Tujuan pemilihan umum

Ramlan subakti

- o pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (publik policy) dalam demokrasi.
- o kedua, pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- o ketiga, pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Jimly asshiddiqie

- o untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai
- o untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
- o untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan
- o untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara

(Muhadam labolo, teguh ilham ; rajawali pers, 2015)